

Merawat Harmoni: Prinsip Deliberatif Jurgen Habermas sebagai Pilar Penghormatan Keberagaman di Indonesia

Riki Leonardo Tangkas¹, Germaida Krisna R. Pakpahan²

^{1,2}Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia Jakarta

Correspondence: 23310014@sttbi.ac.id

Abstract

Diversity in Indonesia is both an identity and a challenge in building social harmony. Deliberative democracy, as proposed by Jurgen Habermas, offers a dialogue mechanism based on rationality and inclusivity to reduce identity-based polarization. This study analyzes how deliberative democracy can be integrated with local wisdom, such as consensus and cooperation, to strengthen religious tolerance and social harmony. Using the literature study methods and critical discourse analysis, this study found that deliberative democracy is relevant in a political context and in building collective awareness of religious and cultural plurality. This approach allows society to participate in a more inclusive and equal public discourse, reducing the potential for SARA-based conflict. From a Christian perspective, the values of love and brotherhood are the moral foundations for people to play an active role in maintaining harmony. The conclusion of this study confirms that integrating deliberative democracy and Christian theological values can be an effective strategy for facing the challenges of tolerance and harmony in Indonesia's multicultural society.

Keywords: *deliberative; democracy; diversity; Jurgen Habermas; harmony*

Abstrak

Keberagaman di Indonesia merupakan identitas sekaligus tantangan dalam membangun harmoni sosial. Demokrasi deliberatif, sebagaimana dikemukakan oleh Jurgen Habermas, menawarkan mekanisme dialog berbasis rasionalitas dan inklusivitas untuk mereduksi polarisasi berbasis identitas. Kajian ini menganalisis bagaimana demokrasi deliberatif dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal, seperti musyawarah mufakat dan gotong royong, guna memperkuat toleransi beragama dan harmoni sosial. Dengan metode studi pustaka dan analisis wacana kritis, penelitian ini menemukan bahwa demokrasi deliberatif tidak hanya relevan dalam konteks politik, tetapi juga dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pluralitas agama dan budaya. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi publik yang lebih inklusif dan setara, sehingga mengurangi potensi konflik berbasis SARA. Dalam perspektif Kristen, nilai kasih dan persaudaraan menjadi landasan moral bagi umat untuk berperan aktif dalam menjaga kerukunan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi demokrasi deliberatif dan nilai-nilai teologis Kristen dapat menjadi strategi efektif dalam menghadapi tantangan toleransi dan harmoni di tengah masyarakat multikultural Indonesia.

Kata Kunci: *deliberatif; demokrasi; Jurgen Habermas; kerukunan; keanekaragaman*

PENDAHULUAN

Keberagaman di Indonesia menjadi identitas sekaligus kekuatan nasional yang tak ternilai. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, enam agama resmi yang diakui negara, serta ratusan bahasa daerah, Indonesia memancarkan kekayaan budaya yang unik di dunia. Namun, keberagaman ini juga menyimpan tantangan besar dalam menjaga keharmonisan sosial. Polarisasi masyarakat berbasis identitas kerap muncul akibat peny-

lahgunaan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang semakin meluas di era digital. Hal ini menunjukkan urgensi membangun strategi yang lebih kokoh dalam merawat kebinekaan bangsa.¹ Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih sistematis dalam merawat keberagaman melalui prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan dialog rasional dan keterbukaan.

Media sosial telah menjadi arena baru bagi berbagai narasi provokatif yang memicu konflik sosial. Nugroho menyatakan bahwa algoritma media sosial memperparah polarisasi masyarakat dengan menampilkan konten yang memperkuat prasangka kelompok tertentu. Penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan propaganda ekstremisme semakin mengkhawatirkan, terutama ketika narasi ini merambat dari dunia maya ke interaksi sosial nyata.² Fenomena tersebut menegaskan pentingnya pendekatan yang sistematis dalam membangun toleransi dan harmoni melalui prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif.³

Jürgen Habermas, dalam teori komunikasi deliberatifnya, menekankan bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga sebuah ruang publik di mana berbagai kelompok masyarakat dapat berdialog secara rasional dan setara. Habermas mengajukan konsep *diskursus etis* sebagai mekanisme untuk mencapai kesepakatan bersama dalam masyarakat yang plural.⁴ Dalam konteks Indonesia, prinsip deliberatif ini dapat menjadi pilar dalam membangun penghormatan terhadap keberagaman, dengan mengedepankan komunikasi yang inklusif, rasional, dan berbasis pada kesetaraan hak setiap personal. Dengan demikian, prinsip demokrasi deliberatif dapat berperan dalam mereduksi polarisasi serta meningkatkan harmoni sosial di tengah masyarakat yang multi-kultural.

Radikalisme berbasis agama turut menjadi ancaman serius bagi stabilitas bangsa. Kelompok-kelompok ekstremis sering kali memanipulasi teks-teks keagamaan untuk membenarkan tindakan intoleran dan kekerasan. Tri Pranadji mengungkapkan bahwa penyebaran paham radikal tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mengkhianati nilai-nilai fundamental agama yang mengajarkan kasih sayang dan perdamaian.⁵ Interpretasi agama yang sempit serta penyebarannya melalui platform digital mempercepat proses radikalisasi di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan deliberatif Habermas menawarkan solusi berbasis dialog rasional yang dapat memfasilitasi pemahaman lintas agama dan budaya. Dengan menghadirkan ruang diskursus yang terbuka dan inklusif, masyarakat dapat membangun kesadaran kolektif untuk menolak ideologi intoleran dan radikal.

Kearifan lokal di Indonesia menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam menjaga kerukunan. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan penghormatan terhadap perbedaan telah lama mengakar dalam budaya bangsa. Prinsip demokrasi menekankan pentingnya kesetaraan hak, kebebasan berpendapat, serta penghormatan terhadap pluralitas. Mohammad Hatta menegaskan bahwa demokrasi adalah

¹ Leo Suryadinata, "Ethnic Groups and the Indonesian Nation-State: With Special Reference to Ethnic Chinese," in *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia* (Routledge, 2018), 43–53.

² Nugroho, Y. & Syarief, S.S. (2020). "Digital Media and Democracy in Indonesia." *Contemporary Southeast Asia*, 42(3), 304-332.

³ Hubertus Herianto and Robertus Wijanarko, "Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia," *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 1 (2022): 53–64.

⁴ Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 1997), 1-3.

⁵ Tri Pranadji, "Keserakahan, Kemiskinan, dan Kerusakan Lingkungan," *Analisis Kebijakan Pertanian* 3, no. 4 (2005): 313–25, <https://doi.org/10.21082/akp.v3n4.2005.313-325>.

sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, cinta kasih, dan budi pekerti luhur meskipun terdapat perbedaan keyakinan, ras, atau budaya. Habermas menegaskan bahwa komunikasi yang demokratis harus berlandaskan pada keterbukaan dan inklusivitas, yang dalam konteks Indonesia dapat dikombinasikan dengan praktik-praktik deliberatif berbasis kearifan lokal. Prinsip demokrasi deliberatif dapat memperkuat musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok secara adil. Ketika prinsip ini dijalankan dengan konsisten, keberagaman dapat menjadi kekuatan kolektif dalam membangun bangsa yang lebih adil dan damai.⁶

Studi mengenai harmoni sosial di Indonesia masih sering bersifat parsial dan kurang mengaitkan prinsip demokrasi deliberatif sebagai fondasi konseptual. Demokrasi deliberatif, sebagaimana dijelaskan oleh Habermas, bukan hanya sistem politik, tetapi juga kumpulan nilai-nilai yang membentuk budaya dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dengan kearifan lokal—seperti musyawarah mufakat dan gotong royong—dapat menjadi strategi efektif dalam menghadapi tantangan kerukunan, di antaranya intoleransi, diskriminasi, dan konflik identitas. Dengan memahami demokrasi secara kontekstual, kerangka berpikir yang dihasilkan tidak hanya lebih relevan dengan realitas Indonesia, tetapi juga mampu menghadirkan solusi konkret yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Upaya ini akan memperkuat harmoni sosial, membuka ruang dialog antarkelompok yang lebih inklusif, dan memastikan keberagaman dapat dikelola sebagai modal sosial yang memperkokoh persatuan nasional.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kerukunan berbasis prinsip demokrasi deliberatif Habermas, mengidentifikasi strategi praktis dalam membangun harmoni dalam pluralitas, serta merumuskan model integrasi nilai demokrasi deliberatif dalam penguatan toleransi beragama dan budaya di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam menjaga keberagaman sebagai modal sosial yang berkelanjutan. Demokrasi deliberatif, ketika diterapkan secara efektif, tidak hanya memperkuat harmoni sosial tetapi juga menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Kajian ini juga akan mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Kristus, seperti kasih, pengampunan, dan penerimaan, sebagai kerangka moral dalam memperkuat prinsip demokrasi deliberatif. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menyusun konsep harmoni berbasis deliberasi, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun dialog lintas agama dan budaya di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dan masyarakat dalam membangun tatanan sosial yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis wacana kritis terhadap konsep demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dalam konteks keberagaman di Indonesia. Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari buku, jurnal akademik, serta dokumen kebijakan terkait dengan demokrasi deliberatif, harmoni sosial, dan toleransi beragama. Analisis dilakukan dengan menelusuri relevansi teori Habermas terhadap kondisi sosial-politik Indonesia serta mengidentifikasi bagaimana prinsip deliberatif dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal seperti musyawarah mufakat dan gotong royong. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji

⁶ Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, 34–45.

peran ajaran Kristus sebagai kerangka moral dalam memperkuat demokrasi deliberatif dalam membangun harmoni sosial. Hasil analisis akan disusun secara sistematis untuk memberikan rekomendasi konseptual dan praktis dalam merawat keberagaman Indonesia berbasis prinsip deliberatif.

PEMBAHASAN

Landasan Teologis Kerukunan dalam Perspektif Pentakostal

Konsep *Imago Dei* yang tertulis dalam Kejadian 1:26-27 menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah, memberikan fondasi teologis yang kuat bagi universalitas nilai-nilai kemanusiaan dalam iman Kristen. *Imago Dei* bukan hanya menunjukkan keistimewaan manusia sebagai ciptaan Allah, tetapi juga menempatkan seluruh umat manusia pada posisi yang sama dalam hal martabat dan nilai intrinsik.⁷ Tidak ada perbedaan yang dapat mengurangi atau menambah nilai tersebut, baik dari segi suku, budaya, agama, maupun status sosial. Dalam pandangan ini, setiap personal memiliki hak untuk dihormati dan dihargai, karena mereka merefleksikan sifat penciptaan ilahi yang sempurna. Prinsip ini menjadi landasan teologis bagi orang Kristen untuk memperlakukan sesamanya dengan penuh penghormatan, tanpa diskriminasi atau prasangka.

Pemahaman teologis ini diperluas dalam Perjanjian Baru, terutama melalui ajaran Yesus Kristus yang menegaskan kasih universal. Rasul Paulus dalam Galatia 3:28 menuliskan, "Tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus." Ayat ini menegaskan bahwa dalam konteks keselamatan dan persekutuan umat, perbedaan sosial, budaya, dan gender menjadi tidak relevan. Kesetaraan di dalam Kristus mendorong umat Kristen untuk menghilangkan segala bentuk pemisahan yang diciptakan oleh manusia.⁸ Dengan demikian, ajaran Kristen tidak hanya meneguhkan persamaan di hadapan Allah tetapi juga mendorong solidaritas sebagai wujud kasih yang nyata dalam komunitas manusia.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, universalitas nilai-nilai kemanusiaan ini memiliki relevansi yang sangat besar. Keberagaman suku, agama, dan budaya merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dan harus dikelola dengan bijaksana. Dengan memahami nilai-nilai universal dalam *Imago Dei*, umat Kristen dapat menjadi pelopor dalam membangun kerukunan di tengah masyarakat yang plural. Nilai ini mendorong penghormatan terhadap pluralitas sebagai bagian dari rencana Allah yang menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing. Sikap ini sejalan dengan semangat Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan persatuan. Lebih lanjut, pemikiran ini sejalan dengan pendapat Dewi Magdalena Rotus, yang menegaskan bahwa nilai-nilai universal dalam Kekristenan mampu menumbuhkan perilaku moral, solidaritas, dan penghormatan terhadap kemanusiaan.⁹ Solidaritas yang berlandaskan iman Kristen adalah bentuk konkret dari kasih Kristus yang diwu-

⁷ Anggi Maringan Hasiholan, "Studi Komparatif terhadap Pemahaman Teologi Reformed dengan Pemahaman Teologi Pentakosta tentang Natur Manusia," *Pneumata* 1, no. 1 (2020): 54–71.

⁸ Naomi Sampe et al., "Continuing the Paul Mission for the Gentiles in the New Era," *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4, no. 2 (2021): 290–302, <https://doi.org/10.34307/b.v4i2.319>.

⁹ Dewi Magdalena Rotua, "Toleransi Agama dan Motif Misi Kristen," *Missio Ecclesiae* 3, no. 2 (2014): 145–61, <https://doi.org/10.52157/me.v3i2.41>.

judkan dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Pemikiran ini sangat diperlukan dalam konteks Indonesia yang sering menghadapi tantangan berupa konflik horizontal akibat perbedaan keyakinan atau etnis. Dengan demikian, teologi universalitas nilai kemanusiaan bukan hanya teori abstrak, tetapi menjadi panduan moral dan etis bagi umat Kristen dalam berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk.

Konsep Persaudaraan dalam Perspektif Iman Kristen

Konsep persaudaraan dalam iman Kristen berakar kuat dalam ajaran Alkitab yang menekankan kasih sebagai dasar relasi antar manusia. Yesus Kristus dalam Markus 3:35 mengatakan bahwa mereka yang melakukan kehendak Allah adalah saudara-Nya, baik laki-laki, perempuan, maupun ibu-Nya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa persaudaraan Kristen bukan hanya berbasis pada ikatan darah atau relasi biologis, tetapi melampaui batas tersebut dan berfokus pada kehendak Allah yang diwujudkan dalam kasih. Persaudaraan rohani ini mengikat semua orang percaya dalam satu komunitas yang disebut tubuh Kristus, di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab untuk saling mendukung. Persaudaraan ini diwarnai dengan kasih *agape*, yakni kasih tanpa syarat yang diajarkan oleh Kristus sebagai tanda identitas pengikut-Nya.¹⁰

Persaudaraan Kristen tidak hanya bersifat internal tetapi juga meluas ke luar komunitas gereja, mencakup semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau budaya. Hal ini terlihat jelas dalam perumpamaan Orang Samaria yang Baik Hati (Luk. 10:25-37), di mana Yesus menekankan pentingnya mengasihi sesama manusia, bahkan mereka yang dianggap sebagai “orang asing” atau kelompok yang dikucilkan.¹¹ Dalam konteks Indonesia, di mana keberagaman sering kali menjadi sumber konflik, ajaran ini menginspirasi umat Kristen untuk membangun relasi harmonis dengan semua pihak. Persaudaraan lintas agama, suku, dan budaya dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam dialog antaragama, kerja sama sosial, dan pelayanan kemanusiaan.

Rasul Paulus dalam Kolose 3:11 juga menegaskan bahwa dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi atau Yunani, budak atau merdeka, karena semua adalah satu. Ayat ini memberikan dasar teologis bahwa persaudaraan Kristen melampaui sekat-sekat identitas sosial dan budaya. Gereja sebagai persekutuan orang percaya dipanggil untuk menjadi wadah inklusif yang menyatukan segala perbedaan dan mempraktikkan kasih yang tidak membeda-bedakan. Di Indonesia, prinsip ini dapat diaplikasikan melalui keterlibatan gereja dalam kegiatan kemasyarakatan yang bersifat inklusif, seperti pembangunan fasilitas umum, bantuan bencana alam, dan program pendidikan yang melibatkan semua elemen masyarakat. Konsep persaudaraan dalam iman Kristen menjadi sangat relevan dalam konteks keragaman Indonesia. Ketika umat Kristen menghidupi prinsip ini dalam tindakan nyata, mereka bukan hanya menjadi saksi kasih Kristus, tetapi juga agen perdamaian di tengah masyarakat yang terfragmentasi. Dengan mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, umat Kristen dapat mengatasi prasangka dan stereotip yang sering memicu konflik. Gereja, melalui program-program sosial dan pastoralnya, memiliki peran strategis dalam mewujudkan persaudaraan sejati yang inklusif dan membawa dampak positif bagi bangsa.

¹⁰ Gernaida K R Pakpahan, “Membangun Solidaritas Kemanusiaan: Kritik Nabi Amos terhadap Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Manna Rafflesia* 7, no. 2 (2021): 441–66.

¹¹ Rendy Adiputra Chandradinata, Hary Kusumo Nugroho, dan Naftali Untung, “Membangun Gereja yang Berkelanjutan: Integrasi Filiarki dan Teologi Pentakostal dalam Kepemimpinan Gereja,” *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan* 11, no. 2 (2021): 260–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.47562/matheo.v11i2.412>.

Ajaran Toleransi dan Penghormatan terhadap Perbedaan

Toleransi dalam perspektif iman Kristen bukan hanya sekadar membiarkan keberadaan pihak lain, tetapi merupakan panggilan untuk mengasihi, menghormati, dan berdialog dengan mereka yang berbeda. Konsep ini berakar pada ajaran Yesus Kristus yang menembus sekat-sekat sosial dan budaya, seperti terlihat dalam kisah Yesus dan perempuan Samaria (Yoh. 4:7-9). Pada masa itu, orang Samaria dipandang rendah oleh orang Yahudi, namun Yesus memilih untuk berinteraksi dengan penuh kasih dan penerimaan.¹² Sikap ini menunjukkan bahwa kasih Allah bersifat universal dan melampaui batasan identitas manusia. Prinsip ini menantang umat Kristen untuk mempraktikkan toleransi aktif yang tidak hanya diucapkan tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.

Dalam konteks Indonesia, toleransi memiliki peran yang krusial dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman agama dan budaya.¹³ Mangantibe dan Taliwuna menyatakan bahwa toleransi agama adalah aset berharga bagi terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.¹⁴ Gereja, sebagai representasi kasih Kristus, dipanggil untuk menjadi teladan dalam menciptakan dialog antariman yang sehat dan produktif. Dialog ini bukan tentang menyeragamkan keyakinan, melainkan membangun pemahaman serta penghormatan terhadap perbedaan yang ada. Toleransi menjadi wujud konkret dari iman Kristen yang memandang keberagaman sebagai anugerah dari Allah yang memperkaya kehidupan bersama.

Teologi Hospitalitas Pentakostal juga menekankan pentingnya keramahan dalam relasi lintas iman. Menurut Anggi Maringan Hasiholan, hospitalitas ini melibatkan sikap menerima perbedaan sebagai bagian dari karya Roh Kudus yang memungkinkan umat percaya untuk hidup berdampingan dengan damai.¹⁵ Hospitalitas Pentakostal menawarkan pendekatan teologis yang relevan dalam konteks Indonesia dengan mendorong umat Kristen untuk menjadi agen rekonsiliasi dan pembawa damai. Sikap ini sejalan dengan Matius 5:9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Dengan demikian, ajaran toleransi dalam iman Kristen tidak hanya menjadi wacana teologis tetapi juga pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Gereja di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menginternalisasi nilai-nilai toleransi ini melalui pendidikan, pelayanan sosial, dan partisipasi aktif dalam kegiatan lintas agama. Ketika umat Kristen mempraktikkan toleransi yang autentik, mereka tidak hanya menciptakan kedamaian, tetapi juga memberikan kesaksian yang kuat tentang kasih Allah yang universal.

Demokrasi Deliberatif dan Integrasi Kearifan Lokal dalam Konteks Indonesia

Demokrasi deliberatif merupakan konsep yang menekankan pentingnya dialog berbasis rasionalitas dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan politik. Konsep ini dikembangkan oleh Jurgen Habermas, yang berargumen bahwa demokrasi tidak hanya

¹² Shirley Lasut et al., "Membingkai Kemajemukan Melalui Pendidikan Agama Kristen di Indonesia," *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 4, no. 2 (2021): 4.

¹³ Gernaida Krisna Pakpahan, Ibnu Salman, dan Andreas Budi Setyobekti, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Upaya Mencegah Radikalisme," *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 7, no. 2 (2021).

¹⁴ Veydy Yanto Mangantibe dan Mario Chlief Taliwuna, "Toleransi Beragama sebagai Pendekatan Misi Kristen di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37364/jireh.v3i1.56>.

¹⁵ Anggi Maringan Hasiholan dan Joshua Alvis Stevenson, "Teologi Agama-Agama dalam Lensa Hospitalitas Pentakostal," *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 13, no. 1 (2023): 197–216, <https://doi.org/10.46495/sdjt.v13i1.195>.

tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang proses deliberatif yang memungkinkan partisipasi warga dalam diskursus publik. Menurut Habermas, "demokrasi deliberatif adalah suatu teori yang menerima deliberasi rasional di antara para warga sebagai sumber legitimasi politik". Dengan kata lain, keputusan yang dibuat dalam sistem demokrasi tidak boleh hanya bersandar pada kehendak mayoritas, tetapi harus melalui diskusi rasional yang melibatkan seluruh warga.¹⁶ Di Indonesia, penerapan demokrasi deliberatif menghadapi tantangan struktural akibat dominasi elite politik, tetapi konsep ini tetap relevan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.

Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, demokrasi deliberatif dapat menjadi mekanisme penguatan harmoni sosial. Sebagaimana dikatakan Habermas, "legitimasi dalam demokrasi deliberatif tidak hanya bergantung pada perolehan suara terbanyak, tetapi pada cara bagaimana keputusan itu diambil melalui diskusi yang adil dan rasional".¹⁷ Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama, demokrasi deliberatif dapat digunakan untuk mengurangi polarisasi sosial yang sering kali muncul akibat perbedaan identitas politik dan agama. Dengan adanya ruang deliberatif, kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kehendak masyarakat secara kolektif dan bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.

Salah satu cara untuk memperkuat demokrasi deliberatif di Indonesia adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses deliberasi. Nilai-nilai seperti *musyawarah mufakat* dan *gotong royong* telah lama menjadi bagian dari budaya politik Indonesia dan dapat berfungsi sebagai instrumen deliberatif dalam membangun harmoni sosial.¹⁸ Habermas sendiri menekankan bahwa "proses deliberatif seharusnya tidak menegasikan tradisi lokal, tetapi mengakomodasi nilai-nilai yang memungkinkan interaksi rasional antar warga". Dalam budaya Indonesia, pengambilan keputusan sering kali dilakukan melalui musyawarah, yang menekankan konsensus dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan.¹⁹ Dengan demikian, demokrasi deliberatif tidak bertentangan dengan budaya lokal, melainkan dapat memperkuatnya.

Konsep ruang publik yang dikemukakan Habermas juga memiliki relevansi dengan praktik demokrasi deliberatif di Indonesia. Ruang publik memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam diskursus politik secara bebas dan setara, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Dalam konteks Indonesia, ruang publik dapat berbentuk forum musyawarah, diskusi masyarakat sipil, dan media sosial yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi politik. Menurut Habermas, "ruang publik yang sehat harus menjamin kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa tekanan dari pihak berwenang atau kelompok dominan".²⁰ Jika ruang publik semacam ini dikelola dengan baik, maka demokrasi deliberatif dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif.

Selain sebagai mekanisme politik, demokrasi deliberatif juga memiliki implikasi sosial yang luas, terutama dalam konteks toleransi beragama. Dalam masyarakat yang

¹⁶ Moh Asy'ari Muthhar, "Membaca Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas dalam Dinamika Politik Indonesia," *USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2016, 49–72.

¹⁷ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1984), 142.

¹⁸ Budi F Hardiman, "Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto?," *Basis*, 2004.

¹⁹ Paulus Pati Lewar dan Otto Gusti Ndegong Madung, "Demokrasi sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas," *Jurnal Ledalero* 21, no. 2 (2022): 150, <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161>.

²⁰ Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, 91.

beragam secara agama, dialog terbuka dan berbasis argumentasi rasional dapat mengurangi kesalahpahaman dan prasangka antar kelompok. Habermas menegaskan bahwa "legitimasi politik dalam masyarakat plural harus didasarkan pada rasionalitas komunikasi, bukan pada hegemoni kelompok tertentu". Dengan demikian, demokrasi deliberatif dapat memperkuat tatanan sosial yang lebih inklusif dan damai, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif terkait identitas keagamaan.²¹

Dalam perspektif Kekristenan, demokrasi deliberatif dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kasih, keadilan, dan perdamaian yang diajarkan dalam Alkitab. Prinsip musyawarah dan keadilan sosial yang ditekankan dalam demokrasi deliberatif sejalan dengan ajaran Yesus tentang keadilan dan pengakuan terhadap sesama tanpa diskriminasi. Seperti yang tertulis dalam Matius 22:39, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," prinsip ini mencerminkan pentingnya dialog dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam konteks ini, gereja dapat memainkan peran sebagai fasilitator dialog dan advokat bagi kelompok-kelompok yang kurang memiliki akses dalam pengambilan keputusan publik. Namun, ada tantangan dalam mengimplementasikan demokrasi deliberatif di Indonesia, terutama dalam hal partisipasi masyarakat yang masih rendah akibat kurangnya literasi politik dan dominasi elite dalam proses kebijakan. Habermas mengingatkan bahwa "tanpa akses informasi yang setara, proses deliberatif bisa berujung pada dominasi opini dari kelompok tertentu". Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan politik dan pemberdayaan komunitas agar proses deliberatif dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, kebijakan publik yang dihasilkan melalui demokrasi deliberatif seringkali menghadapi hambatan birokrasi dan kepentingan politik yang menghambat implementasinya. Habermas menekankan bahwa "demokrasi yang sehat bukan hanya tentang bagaimana keputusan dibuat, tetapi juga tentang bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan secara adil dan transparan". Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kelembagaan yang memungkinkan keputusan berbasis deliberasi dapat diakomodasi dalam sistem hukum dan politik nasional. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, penerapan demokrasi deliberatif memerlukan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual. Kombinasi antara prinsip demokrasi deliberatif dan nilai-nilai lokal dapat menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh berbagai kelompok. Seperti yang dikatakan Habermas, "demokrasi deliberatif bukanlah konsep yang kaku, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya setempat". Dengan demikian, demokrasi deliberatif dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi dinamika sosial dan politik Indonesia.

Implikasi Demokrasi Deliberatif terhadap

Toleransi Beragama: Perspektif Kristen

Penguatan Dialog Antariman dan Antarbudaya

Keberagaman agama dan budaya yang menjadi ciri khas Indonesia merupakan kekayaan yang tak ternilai sekaligus tantangan dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis. Sebagai negara demokratis, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negaranya dapat menjalankan keyakinan dan mengekspresikan identitas budayanya dengan bebas namun tetap dalam bingkai persatuan. Penguatan dialog antariman dan antarbudaya menjadi salah satu pendekatan strategis dalam mewujudkan kerukunan di tengah pluralitas ini. Demokrasi deliberatif, membe-

²¹ M Muttaqien, "Konsep Komunikasi Jurgen Habermas dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif," *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi* VOLUME VI, no. I (2023): 51–64.

rikan ruang bagi dialog yang berbasis rasionalitas dan keterbukaan sebagai cara untuk mengatasi konflik identitas dalam masyarakat plural. Melalui dialog yang konstruktif dan berkesinambungan, berbagai elemen masyarakat dapat saling memahami, menghargai perbedaan, dan menemukan nilai-nilai bersama yang memperkuat persatuan bangsa.

Menurut Habermas, "sebuah masyarakat demokratis harus memberikan ruang publik yang memungkinkan warga dengan berbagai latar belakang untuk berinteraksi, berbagi nilai, dan membangun pemahaman bersama".²² Menurut Masykur Wahid, penguatan dialog ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti forum diskusi antaragama, festival budaya, dan program pertukaran budaya. Dalam konteks Indonesia yang multikultur, dialog antariman dan antarbudaya menjadi instrumen vital untuk mencegah konflik sosial dan memperkuat kohesi sosial. Beberapa bentuk penguatan dialog antariman dan antarbudaya mencakup: pertemuan rutin pemuka agama, program *sister city* antardaerah, festival seni budaya lintas etnis, dan forum-forum dialog pemuda lintas agama. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya keberagaman dan menciptakan ruang interaksi yang konstruktif antar kelompok masyarakat yang berbeda.²³

Contoh konkret program dialog antariman yang telah berhasil dilaksanakan di berbagai daerah. Di Maluku, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara rutin mengadakan pertemuan "Pela Gandong" yang mempertemukan pemuka agama Islam dan Kristen untuk membahas isu-isu sosial dan mencari solusi bersama. Program ini telah berhasil meredam potensi konflik dan membangun kepercayaan antarkomunitas. Di Yogyakarta, "Dialog Lintas Iman Yogyakarta" (DIAN) menggelar program kunjungan rumah ibadah untuk pelajar dan mahasiswa. Para peserta berkesempatan mengunjungi masjid, gereja, pura, dan vihara sambil berdialog dengan pemuka agama setempat. Inisiatif ini telah meningkatkan pemahaman antariman di kalangan generasi muda. Sementara di Medan, "Festival Bhinneka Tunggal Ika" menampilkan kolaborasi seni budaya antarkomunitas agama.²⁴ Festival tahunan ini tidak hanya menjadi ajang pertunjukan, tetapi juga wadah dialog informal yang mendekatkan berbagai kelompok masyarakat melalui apresiasi kesenian. Program "Dapur Bersama" di Ambon mengajak ibu-ibu dari berbagai latar belakang agama untuk memasak dan berbagi makanan tradisional. Kegiatan ini membuktikan bahwa dialog antariman bisa dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan Pendidikan Multikultural

Pengembangan pendidikan multikultural merupakan langkah strategis dalam memperkuat pemahaman keberagaman sejak dini. Habermas menekankan bahwa "pendidikan dalam masyarakat demokratis harus didasarkan pada dialog terbuka dan argumentasi rasional, sehingga memungkinkan personal memahami dan menghargai perspektif yang berbeda".²⁵ Menurut Tilaar, melalui integrasi nilai-nilai multikultural ke dalam kurikulum pendidikan, peserta didik dibekali dengan pemahaman dan penghar-

²² Asy'ari Muthhar, "Membaca Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas dalam Dinamika Politik Indonesia."

²³ Masykur Wahid, "Resolusi Konflik dan Islam Nusantara: Memromosikan Dialog Antarbudaya dan Rekognisi Sosial," *Refleksi* 15, no. 2 (2018): 139–64, <https://doi.org/10.15408/ref.v15i2.10164>.

²⁴ Anggi Maringan Hasiholan and Aldi Abdillah, "The Concept of Love in Islam, Christianity, and Judaism for the Postmodern Indonesian Religious Communities," *Dialog* 45, no. 2 (2022): 195–206, <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.652>.

²⁵ Lewar and Ndegong Madung, "Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas."

gaan terhadap perbedaan budaya, agama, dan etnis. Pendekatan ini mencakup pengembangan materi pembelajaran yang inklusif, pelatihan guru tentang sensitivitas budaya, dan implementasi metode pembelajaran yang mendorong interaksi positif antar siswa dari berbagai latar belakang.²⁶

Pertautan antara pendidikan dan multikultural solusi atas realitas budaya yang beragam sebagai sebuah proses pengembangan seluruh potensi yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi dalam keragaman budaya, etnis, suku, aliran, bahasa, maupun agama.²⁷ Jeni, dkk, mengatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan sebuah nilai penting dalam pendidikan yang harus diperjuangkan. Salah satu yang menjadi alasan karena dipandang sebagai wadah proses pengembangan seluruh potensi peserta didik berbasis pada pemanfaatan keberagaman di lingkungan masyarakat, seperti etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, suku dan ras.²⁸ Dalam hal ini pendidikan multikultural berupaya untuk meminimalisir adanya konflik akibat keadaan masyarakat yang majemuk dan heterogen agar setiap masyarakat memiliki kesadaran, dapat menghargai, menghormati dan memiliki pikiran terbuka terhadap perbedaan. Dengan demikian, pendidikan multikultural menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap keberagaman.

Implementasi Kebijakan Inklusif

Implementasi kebijakan inklusif dalam konteks keberagaman di Indonesia dapat diwujudkan melalui pengembangan regulasi yang mendukung kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh kelompok masyarakat, terlepas dari latar belakang agama dan budayanya. Habermas menegaskan bahwa "suatu kebijakan yang demokratis harus memberikan kesempatan setara bagi semua warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan". Kebijakan ini harus didukung oleh program-program konkret yang memfasilitasi dialog antarkelompok, seperti forum komunikasi lintas agama dan festival budaya yang melibatkan berbagai komunitas. Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya representasi yang seimbang dari berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan publik, sehingga aspirasi setiap kelompok dapat terakomodasi dengan baik. Abustan dalam tulisannya mengatakan hal yang hampir sama, bahwa negara harus secara aktif mendukung masyarakat demokratis multikultural, menumbuhkan toleransi agama dan koeksistensi yang harmonis di antara komunitas yang beragam untuk memastikan pemenuhan hak-hak warga negara.²⁹ Menurut Peter Suwarno, perlunya kebijakan inklusif di Indonesia untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan ketenagakerjaan di antara kelompok yang beragam. Ini menunjukkan bahwa mengembangkan peraturan yang mendukung kesetaraan hak dan peluang sangat penting untuk mendorong partisipasi di berbagai latar belakang ekonomi, gender, dan geografis. Dengan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, kesukarelaan, dan filantropi, kebijakan ini dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan berkontribusi pada tujuan

²⁶ Henry Alexis Rudolf Tilaar dan Suratina Dhian Hapsari, *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2004).

²⁷ Ahmad Suradi, "Pendidikan Berbasis Multikultural dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Nusantara di Era Globalisasi," *Wahana Akademika Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2018, <https://doi.org/10.21580/wa.v5i1.2566>.

²⁸ Jeni Danurahman, Danang Prasetyo, dan Hendra Hermawan, "Kajian Pendidikan Multikultural di Era Digital," *Jurnal Kalacakra Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2021, <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v2i1.3515>.

²⁹ Abustan, "Pluralism and Equality in the Perspective of Human Rights in Indonesia," *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.24205>.

pembangunan berkelanjutan (SDGs), memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terlepas dari latar belakang agama dan budaya mereka, didukung.³⁰

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan sering diinterpretasikan sebagai keadaan yang mencerminkan perdamaian, keteraturan, ketenangan, kesejahteraan, saling menghormati dan dihormati, saling menghargai, memiliki sikap toleransi, serta semangat gotong-royong, yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama dan prinsip-prinsip Pancasila. Nazmudin dalam tulisan Ibnu Salman, mengemukakan bahwa kementerian agama telah mengembangkan pendekatan tiga kerukunan (Trilogi Kerukunan), yaitu: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah.³¹ Trilogi ini bukan hanya mencegah konflik namun mampu menciptakan stabilitas bangsa dalam bingkai pembangunan nasional. Untuk itu Rachmadhani menuturkan bahwa kerukunan harus melahirkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga kerukunan umat beragama itu dinamis dan bukanlah teoritis tetapi harus merupakan refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai suatu komunitas atau masyarakat.³² Penelitian Eko Siswanto, dkk, ditemukan adanya peran FKUB untuk mewujudkan kerukunan beragama di Jayapura, tetapi sejatinya hal itu tidak berdiri sendiri namun ada peran norma-norma sosial kemasyarakatan yang universal.³³ Dalam studi kasus yang dilakukan ditemukan bahwa nilai-nilai Pancasila dipetakan menjadi tiga strategi besar. Pertama, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan dalam dialog tokoh agama dengan tokoh masyarakat. Kedua, nilai demokrasi permusyawaratan dalam menampung dan merekomendasikan aspirasi keagamaan dan kemasyarakatan sebagai kebijakan pemerintah. Ketiga, nilai keadilan universal dalam sosialisasi kebijakan pemerintah tentang kerukunan umat beragama. Implikasi teoritik dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelbagai nilai sosial dan keberagaman yang termuat dalam Pancasila berkontribusi besar dalam membina kerukunan hidup antar umat beragama.

Terbentuknya kerukunan yang berkelanjutan karena adanya nilai-nilai filosofi Pancasila, nilai-nilai agama dan adanya modal sosial di tengah masyarakat. Menurut Nuriyanto, modal sosial ini tidak lepas dari bentuk kearifan lokal masyarakat dan kebiasaan yang sudah menjadi rutinitas masyarakat, sehingga masyarakat tidak saling memiliki rasa untuk menyalahkan dan justru kerukunan semakin terjalin.³⁴ Memberdayakan forum untuk keharmonisan agama melibatkan inisiatif strategis yang mendorong dialog, pemahaman, dan kerja sama di antara komunitas agama yang beragama. Forum Keharmonisan Agama (FKUB) memainkan peran penting dalam upaya ini dengan menerapkan berbagai strategi untuk mempromosikan moderasi dan harmoni agama.

³⁰ Peter, Suwarno. (2019). 5. Equality in Education and Employment for Sustainable Development of Diverse Indonesia: Enhancing Equal Opportunity, Volunteerism, and Philanthropy. doi: 10.2991/NFEIC-18.2019.1

³¹ Nazmudin Nazmudin, "Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Journal of Government and Civil Society*, 2018, <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>.

³² Cherni Rachmadani, "Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan Di RT.29 Samarinda Semarang," *EJournal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2013): 212–27.

³³ Amirullah Amirullah et al., "Pancasila dan Kerukunan Hidup Umat Beragama: Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura," *Inovatif Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Kebudayaan*, 2022, <https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i1.272>.

³⁴ Lilam Kadarin Nuriyanto, "Modal Sosial dalam Membingkai Kerukunan Umat Beragama di Surakarta (Studi Kasus di Kecamatan Serengan Dan Jebres)," *Al-Qalam*, 2018, <https://doi.org/10.31969/alq.v24i2.477>.

Strategi ini sangat penting dalam mengatasi tantangan seperti intoleransi dan radikalisme, yang dapat muncul dari keragaman agama.

KESIMPULAN

Demokrasi deliberatif, sebagai sebuah konsep yang menekankan dialog rasional dan keterbukaan, memiliki relevansi yang kuat dalam membangun harmoni sosial di Indonesia. Melalui mekanisme diskursus publik yang inklusif, masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan tanpa terjebak dalam polarisasi berbasis identitas. Integrasi nilai-nilai lokal seperti musyawarah mufakat dan gotong royong dengan prinsip demokrasi deliberatif dapat menjadi instrumen penting dalam merawat keberagaman. Selain itu, pendidikan multikultural dan kebijakan inklusif juga memainkan peran strategis dalam memastikan keberagaman tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru memperkuat solidaritas sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa harmoni dalam keberagaman dapat diwujudkan ketika masyarakat diberikan ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam proses deliberatif yang adil dan setara. Dalam perspektif Kristen, demokrasi deliberatif selaras dengan nilai-nilai kasih, pengampunan, dan persaudaraan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Konsep *Imago Dei* menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah, sehingga diskriminasi atas dasar agama atau etnis bertentangan dengan prinsip iman Kristen. Gereja memiliki peran strategis dalam mempromosikan toleransi dan dialog lintas agama melalui pendidikan, pelayanan sosial, dan partisipasi dalam forum keagamaan. Dengan demikian, demokrasi deliberatif tidak hanya menjadi alat politik, tetapi juga sebuah panggilan moral bagi umat Kristen untuk mewujudkan damai sejahtera dalam masyarakat yang plural. Integrasi nilai-nilai teologis dengan demokrasi deliberatif dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban, yang pada akhirnya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

REFERENSI

- Abustan. "Pluralism and Equality in the Perspective of Human Rights in Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.24205>.
- Amirullah, Amirullah, Eko Siswanto, Syaiful Muhyidin, and Athoillah Islamy. "Pancasila Dan Kerukunan Hidup Umat Beragama: Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peran Forum Kerukunan Umat Bergama Kota Jayapura." *Inovatif Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Kebudayaan*, 2022. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i1.272>.
- Asy'ari Muthhar, Moh. "Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia." *USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2016, 49–72.
- Chandradinata, Rendy Adiputra, Hary Kusumo Nugroho, and Naftali Untung. "Membangun Gereja Yang Berkelanjutan: Integrasi Filiarki Dan Teologi Pentakostal Dalam Kepemimpinan Gereja." *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan* 11, no. 2 (2021): 260–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.47562/matheo.v11i2.412>.
- Danurahman, Jeni, Danang Prasetyo, and Hendra Hermawan. "Kajian Pendidikan Multikultural Di Era Digital." *Jurnal Kalacakra Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2021. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v2i1.3515>.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democrac*. Cambridge: MIT Press, 1984.

- — —. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 1997.
- Hardiman, Budi F. "Demokrasi Delibelatif: Model Untuk Indonesia Pasca-Soeharto?" *Basis*, 2004.
- Hasiholan, Anggi Maringan. "Studi Komparatif Terhadap Pemahaman Teologi Reformed Dengan Pemahaman Teologi Pentakosta Tentang Natur Manusia." *Pneumata* 1, no. 1 (2020): 54–71.
- Hasiholan, Anggi Maringan, and Aldi Abdillah. "The Concept of Love in Islam, Christianity, and Judaism for the Postmodern Indonesian Religious Communities." *Dialog* 45, no. 2 (2022): 195–206. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.652>.
- Hasiholan, Anggi Maringan, and Joshua Alvis Stevenson. "Teologi Agama-Agama Dalam Lensa Hospitalitas Pentakostal." *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 13, no. 1 (2023): 197–216. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v13i1.195>.
- Herianto, Hubertus, and Robertus Wijanarko. "Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan Di Indonesia." *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 1 (2022): 53–64.
- Krisna Pakpahan, Gernaida, Ibnu Salman, and Andreas Budi Setyobekti. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Mencegah Radikalisme." *KURIOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 7, no. 2 (2021).
- Lasut, Shirley, Johny Hardori, Sadrah Sugiono, Yada Putra Gratia, Jannes Edward Sirait, and Channel Eldad. "Membingkai Kemajemukan Melalui Pendidikan Agama Kristen Di Indonesia." *FIDEI: Jurnal Teologi Sistemika Dan Praktika* 4, no. 2 (2021): 4.
- Lewar, Paulus Pati, and Otto Gusti Ndegong Madung. "Demokrasi Sebagai Diskursus Dan Deliberasi Menurut Júrgen Habermas." *Jurnal Ledalero* 21, no. 2 (2022): 150. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161>.
- Mangantibe, Vedy Yanto, and Mario Chlief Taliwuna. "Toleransi Beragama Sebagai Pendekatan Misi Kristen Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37364/jireh.v3i1.56>.
- Muttaqien, M. "Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif." *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi* VOLUME VI, no. I (2023): 51–64.
- Nazmudin, Nazmudin. "Kerukunan dan Toleransi Antarumat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Journal of Government and Civil Society*, 2018. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>.
- Nuriyanto, Lilam Kadarin. "Modal Sosial dalam Membingkai Kerukunan Umat Beragama di Surakarta (Studi Kasus Di Kecamatan Serengan Dan Jebres)." *Al-Qalam*, 2018. <https://doi.org/10.31969/alq.v24i2.477>.
- Pakpahan, Gernaida K R. "Membangun Solidaritas Kemanusiaan: Kritik Nabi Amos terhadap Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Manna Rafflesia* 7, no. 2 (2021): 441–66.
- Pranadji, Tri. "Keserakahan, Kemiskinan, dan Kerusakan Lingkungan." *Analisis Kebijakan Pertanian* 3, no. 4 (2005): 313–25. <https://doi.org/10.21082/akp.v3n4.2005.313-325>.
- Rachmadani, Cherni. "Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan di RT.29 Samarinda Semarang." *EJournal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2013): 212–27.
- Rotua, Dewi Magdalena. "Toleransi Agama dan Motif Misi Kristen." *Missio Ecclesiae* 3, no. 2 (2014): 145–61. <https://doi.org/10.52157/me.v3i2.41>.
- Sampe, Naomi, Perdi Masuang, Gantina Banne Lembang, Rinus Menok Sara, and Karel Sanda Toding. "Continuing the Paul Mission for the Gentiles in the New Era."

- BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4, no. 2 (2021): 290–302.
<https://doi.org/10.34307/b.v4i2.319>.
- Suradi, Ahmad. "Pendidikan Berbasis Multikultural dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Nusantara di Era Globalisasi." *Wahana Akademika Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2018. <https://doi.org/10.21580/wa.v5i1.2566>.
- Suryadinata, Leo. "Ethnic Groups and the Indonesian Nation-State: With Special Reference to Ethnic Chinese." In *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, 43–53. Routledge, 2018.
- Tilaar, Henry Alexis Rudolf, dan Suratina Dhian Hapsari. *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2004.
- Wahid, Masykur. "Resolusi Konflik dan Islam Nusantara: Memromosikan Dialog Antarbudaya dan Rekognisi Sosial." *Refleksi* 15, no. 2 (2018): 139–64.
<https://doi.org/10.15408/ref.v15i2.10164>.